

**PEMBERIAN UTANG OLEH NEGARA TIONGKOK KEPADA
NEGARA INDONESIA DLAM PERSPEKTIF SISTEM
EKONOMI ISLAM**

**DEBTS PROVISION FROM THE REPUBLIC OF CHINA FOR
INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
ECONOMY**

Nurul Khanif dan M. Sobar, S.El., M.Sc

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ring Road Barat, Tamantirto,
Kasihlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184.*

Khaniffnur@gmail.com

Sobarjohari83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengkaji bagaimana praktek utang piutang yang diberikan negara Tiongkok kepada negara Indonesia. Data yang dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan murni (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem yang di pakai oleh negara Tiongkok masih bertumpu pada keuntungan semata (kapitalis) dimana masih memberatkan pihak yang berutang. Hal ini juga dampak dari kebijakan hutang luar negeri Indonesia masih belum ditinjau sepenuhnya, terlebih belum menggunakan nilai-nilai kajian ekonomi religius seperti ekonomi Islam yang sebenarnya bisa bermuara pada penciptaan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : *Hutang piutang, Negara Tiongkok, Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Islam*

Abstrack

***DEBTS PROVISION FROM THE REPUBLIC OF CHINA FOR INDONESIA
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMY***

This study aims at finding out or studying towards the practice of debts provided by the Republic of China for Indonesia. The data was collected trough library research and the literatures were derived from books, encyclopedia, journals, magazines, newspapers, etc. The method us in this study is qualitative

was analytical descriptive according to the existing problem. Secondary data was used in the study. Result shows that due to the capitalist system applied in the Republic of China, where the debtors are still incriminated, it can be concluded that Indonesian foreign debt system is still not implementing Islamic Economy. Islamic economy is expected to be implemented for the sake of welfare for both parties.

Keywords: *Debts, the Republic of China, Indonesia, Islamic Economi System.*

PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pertumbuhan perekonomian negara Tiongkok tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan 10 persen pertahun dalam kurun 30 tahun terakhir. Tiongkok juga merupakan negara pengekspor terbesar di dunia.

Tiongkok merupakan negara yang memiliki paham sosialis/komunis. Dimana masalah perekonomiannya diatur oleh negara dan warga negara yang akan menentang hukum. Namun di era sekarang, Tiongkok perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Sudah tidak ada lagi pengekangan terhadap pers dan negara memberi kebebasan kepada warga negara untuk bersaing dari segi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Tiongkok mulai mengarah dari Sosialis menuju Kapitalis. Namun sepertinya lebih kepada sistem ekonomi campuran yang isinya adalah sistem ekonomi sosialis dengan Kapitalis. Pada intinya sistem ekonomi yang dianut oleh negara Tiongkok telah berevolusi dari sistem sosialis menjadi sistem ekonomi campuran.⁶⁴

Indonesia memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) akan tetapi lemah dalam Sumber Daya Manusia (SDM), maka dari itu Indoensia membutuhkan modal untuk mengembangkan potensi yang ada. Modal ini bisa di dapat dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dll yang tergabung dalam CGI (*Consultative Group on Indonesia*), IMF (*International Monetary Fund*), ADB (*Asian Development Bank*), World Bank, dll.

⁶⁴ <http://www.onlenpedia.com/2016/12/semua-tentang-sistem-ekonomi-negara.html> diakses jam 11:15 tanggal 24/11/2017.

Akan tetapi pinjaman dari luar negeri tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu, karena negara maju termasuk negara Tiongkok pada umumnya memiliki sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan penimbunan kekayaan. Sehingga dalam pemberian hutang kepada negara Indonesia juga mereka akan memperhatikan serta memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang akan di peroleh.

Peningkatan utang negara Indonesia yang meningkat setiap tahun, hal ini disebabkan karena perilaku boros yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan anggaran negaranya. Sedangkan salah satu faktor pemborosan ini adalah adanya faktor korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Bahkan ada salah satu kebijakan yang dimana mengambil utang luar negeri untuk menutupi utang luar negeri yang jatuh tempo. Dengan utang luar negeri yang surplus dibandingkan dengan pemasukan yang di dapat oleh negara, maka dengan keadaan demikian negara mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak pada setiap lini transaksi yang ada, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, serta menaikkan beban biaya rumah sakit. Kebijakan yang diambil tersebut dapat membebani masyarakat Indonesia.

Bagaimanapun juga utang luar negeri harus diakui banyak memberikan hasil bagi pembangunan negara. Pembangunan berbagai proyek prasarana seperti bendungan, irigasi, listrik, telepon, jembatan, jalan, sarana transportasi laut, darat, udara dll, yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga Indonesia pada akhirnya mencapai tingkat penghasilan perkapita yang meningkat. Indonesia bahkan sempat menjadi salah satu contoh keajaiban ekonomi dunia.⁶⁵

Tidak hanya itu saja, Tiongkok masih berminat untuk mendanai sejumlah waduk di Indonesia, seperti jalan tol Cileunyi-Dawuan bagian I, pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok, pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan serta perbaikan jembatan, pembangunan bendungan serbaguna

⁶⁵ Cyrillus Harinowo, *Utang Pemerintah(perkembangan, prospek dan pengelolaannya)*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm5.

pelosika, pembangunan bendungan Jenelata, pembangunan bendungan Rokan Hilir/ Lomapatan Harimau, pembangunan bendungan serbaguna Jambo Aye, pembangunan bendungan Bonehulu, dan pengadaan material kereta api fase III dan IV.⁶⁶

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan penuh serta hak kepemilikan mutlak kepada individu dan menggalakkan usaha perseorangan. Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut.⁶⁷

Memang dalam pemberian hutang dari negara maju terhadap negara berkembang belum ada yang menggunakan sistem anti riba. Termasuk pemberian utang yang diberikan oleh negara Tiongkok kepada Indonesia. Sebab sistem yang digunakan oleh negara maju ialah menggunakan sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan juga campuran yang dimana dalam pemberian hutangnya mereka akan melihat dan memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang akan di dapat dari negara berkembang khususnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh sebab itu dalam pembahasan nanti akan dijelaskan macam macam akad kerjasama yang bisa digunakan oleh negara Indonesia untuk tidak melakukan utang luar negeri.

Penelitian yang ditulis oleh Winda Afriyenis tentang Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, di jelaskan bahwasanya pemberian utang oleh negara maju kepada negara berkembang masih belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang semestinya. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini masih menganut

⁶⁶ <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/yKX4wEaK-ini-proyek-tiongkok-untuk-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia diakses tanggal 19/10/2017 jam 11:10>

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.3, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.11

sistem bunga (riba) yang dikenal dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan tambahan dari pengembalian utang yang disyaratkan oleh negara kreditur. Sehingga menurut pandangan Islam hutang luar negeri saat ini masih belum sesuai dengan utang piutang yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶⁸

Penelitian ini hendak melihat praktek utang-piutang dalam dunia internasional (antara negara Tiongkok sebagai kreditur dan negara Indonesia sebagai debitur) dari perspektif sistem ekonomi Islam. Peneliti juga hendak melihat apakah antara teori, praktek, serta implikasinya dari pinjaman luar negeri itu sesuai atau tidaknya dengan kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam yang ada, yang pada dasarnya lebih mengutamakan moral dan kemaslahatan manusia.

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan, secara rinci permasalahan yang dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan, Bagaimana pemberian hutang oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia dalam perspektif sistem ekonomi Islam?

Adapun tujuan dan kegunaan penelitiannya adalah untuk mengkaji bagaimana praktek utang piutang yang diberikan negara Tiongkok kepada negara Indonesia. Dan kegunaannya ialah untuk memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang praktek-praktek ekonomi terutama yang berkaitan tentang transaksi utang piutang dalam dunia Internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan murni (*library research*), sehingga penggalan data kepustakaan yang digunakan ialah berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang masih ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.⁶⁹

⁶⁸ Jurnal Kajian Ekonomi Islam Volume 1 No 1 Januari-Juni 2016, Winda Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam terhadap utang luar negeripemerintah dalam pembangunan ekonomii Indonesia".

⁶⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Gramedia, 1998, hlm 111

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai macam metode alamiah.⁷⁰

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalian data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang membahas tentang sistem pinjam meminjam (utang piutang). Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang secara langsung tidak berkaitan dengan pokok bahasan tetapi masih ada kaitannya.

Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengidentifikasi interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu *maslahat atau mudharat*. Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari studi pustaka dalam menguatkan teori, dengan melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah utang luar negeri memang sudah ada dimulai sejak penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang ditandatangani oleh Hatta, yang di kemudian di sepakati bahwa utang yang berjumlah 4 USD miliar di serahkan kepada pemerintah Indonesia. Namun pada pemerintahan Soekarno utang ini tidak kunjung di bayar dan juga tidak dinyatakan di hapus. Pada amsa pemerintahan soekarno ini menjadi tolak ukur Indonesia dengan Tiongkok, sebab pada saat itu Tiongkok bagaikan mercusuar kearah mana Indonesia harus dibangun. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Soekarno ini juga sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima tawaran bantuan atau

⁷⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2012, hlm 6.

pinjaman dari negara lain.⁷¹ Semangat kemerdekaan yang masih kental menjadi sikap antisipatif terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru melalui pemberian bantuan dan utang.⁷²

Pada saat peralihan orde lama ke orde baru perekonomian di Indonesia mengalami luka parah, karena tingkat inflasi mencapai 65 persen dan pendapatan perkapita hanya 80 dolar per tahun sedangkan utang yang harus di bayar adalah sejumlah 2,2 miliar dolar. Untuk mengatasi masalah kesulitan tersebut, maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijaksanaan untuk mengadakan konsolidasi, rehabilitasi, stabilisasi, dan juga memutuskan untuk mengadakan pendekatan ke luar negeri dengan maksud mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang-utang lama, serta mengusahakan bantuan-bantuan keuangan yang baru dari luar negeri untuk mendukung neraca pembayaran Indonesia, dan berusaha menarik penanaman modal asing ke Indonesia.

Jumlah utang pemerintah yang semestinya jatuh tempo pada tahun tersebut akan dijadwalkan ulang untuk pembayarannya untuk lima tahun kedepannya, dengan masa jeda pembayaran satu sampai dua tahun. Ini artinya pemerintah Indonesia diberikan penangguhan atau waktu untuk melunasi hutang Indonesia yang sudah jatuh tempo atau hutang yang berasal dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga dari situ pemerintah Indonesia juga bisa memikirkan bagaimana caranya supaya dalam waktu yang telah disepakati itu pemerintah Indonesia harus bisa membayar setidaknya bunganya terlebih dahulu. Sebagai realisasi kebijakan tersebut maka diadakanlah pertemuan dengan lembaga multilateral yang berada di Tokyo dengan dinamakan Tokyo club. Dalam Tokyo club tersebut tidak hanya membicarakan *rearrangement* pembayaran utang, tetapi juga mencakup bantuan modal baru. Setelah berakhirnya Tokyo club ini dilanjutkan dengan pertemuan di Pari yang dinamakan dengan Paris Meeting, yang di dalamnya terdapat pertemuan dari pemerintah Indonesia dan negara negara *Reshceduling*.

⁷¹ <https://www.antaranews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi-diakses-pada-jam-12:40-tanggal-20/11/2017>.

⁷² Suratno, "Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah, Tabungan Domestik, dan Angkatan kerja Terhadap Pertumbuhan di Indonesia", Tesis, UGM:2015, hlm 1.

Kemudian dilanjutkan pada pemerintah Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gusdur, pada saat beliau menjadi orang nomor satu di Indonesia beliau berkunjung ke negara Tiongkok dan mengatakan bahwa di negara Tiongkok memiliki potensi kekuatan ekonomi yang besar sehingga akan rugi jika pemerintah Indonesia tidak bekerjasama dengan negara Tiongkok.

Dilanjutkan pemerintahan Megawati, dimana antara negara Tiongkok dan negara Indonesia bekerjasama dalam bidang energi. Megawati pernah menyampaikan dalam pidatonya bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati terhadap bantuan yang diberikan oleh negara Tiongkok. Jangan sampai kita terlalu bersenang-senang dengan bantuan yang diberikannya. Karena pada dasarnya bantuan yang diberikan oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia itu sama saja dengan pinjaman yang harus dikembalikan pada saat atau waktu yang telah disepakati.

Hubungan pemerintah Tiongkok dan pemerintahan Indonesia pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai, sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok juga akan memberikan makna yang lebih dengan rangkaian kerjasama yang lebih nyata, dan juga memberikan manfaat dan kemakmuran bagi negara Indonesia dan negara Tiongkok.⁷³

Selanjutnya pada pemerintahan Jokowi pemberian utang atau pinjaman yang diberikan oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia lebih kepada dana Infrastruktur, guna untuk membangun ketertinggalan Indonesia dalam bidang. Pembangunan Infrastruktur ini dilakukan agar negara Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

Beban utang luar negeri Indonesia saat ini sangatlah banyak, karena utang tersebut meningkat setiap tahunnya. Sebenarnya permasalahan dalam utang luar negeri ini adalah adanya penghisapan sumber daya yang ada di negara berkembang khususnya di Indonesia. Beban utang luar negeri ini terdiri dari beban langsung dan beban tidak langsung. Beban langsung ialah beban yang

⁷³ <https://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi> diakses pada jam 13:17 tanggal 19/11/2017

sudah merupakan suatu hal yang jelas. Selama jangka waktu tertentu, beban utang luar negeri dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun pembayaran cicilan terhadap negara kreditur. Sedangkan beban tidak langsung sudah merupakan suatu pinjaman luar negeri bukan dalam bentuk uang tetapi karena adanya pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam bidang produksi dan konsumsi melalui pemungutan pajak yang diperlukan untuk melakukan pembayaran bunga dan cicilan utang serta melalui kegiatan pengeluaran negara untuk meningkatkan produksi dengan hasil pinjaman tersebut.⁷⁴

Kerjasama utang luar negeri ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerjasama Bilateral dan Multilateral. Utang bilateral ini merupakan penerimaan dari negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi utang luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian utang yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Utang multilateral adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberian utang luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan Internasional. Namun pemberian utang melalui lembaga Multilateral bukan berarti tanpa resiko, sebagai bukti keterlibatan IMF dengan kebijaksanaan deflasionernya yang sering menghasilkan guncangan politik yang traumatik di negara berkembang dan kebijakan lembaga Multilateral lainnya masih didominasi oleh kepentingan dan pandangan negara maju.⁷⁵

Delapan perjanjian yang di tandatangani pada saat pemerintaha Jokowi diantaranya ialah :

⁷⁴ Ratna Setyawati Gunawan, "Hubungan Simultan antara Utang Luar Negeri pemerintah dan PDB Di Indonesia tahun 1970-2002", Tesis:UGM, 2005, hlm 17.

⁷⁵ Mohtar Mas'ood, 1989,op. Clt. Hlm 134-135, "dalam Skripsi Utang Luar Negeri dan Hak Asasi Manusia studi kasus Indonesia-Belanda oleh Ronggo Sadono, 1992, hlm 11".

1. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok.
2. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama proyek pembangunan Kereta Api Jakarta-Bandung antara kementerian BUMN dan komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok.
3. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan kementerian Transportasi Republik Rakyat Tiongkok.
4. Protokol persetujuan antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah pengenaan pajak berganda.
5. Kerangka kerjasama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa Republik Rakyat Tiongkok.
6. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama saling dukung antara kementerian BUMN dan Bank Pembangunan Tiongkok.
7. Nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara.
8. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama dalam bidang Industri dan Infrastruktur antara kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok.⁷⁶

Idealnya utang yang sehat adalah utang yang semakin lama semakin kecil, namun pada kenyataannya utang Indonesia semakin menumpuk bukan semakin menipis. Tetapi apabila kita menengok kasus Indonesia dimana utangnya yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini bisa terjadi karena pola pembangunan yang tidak sesuai. Selain itu ada juga berbagai faktor, seperti faktor korupsi, kesalahan dalam mengelola,

⁷⁶<https://jakartagreater.com/mou-kerjasama-antara-pemerintah-republik-indonesia-ri-dengan-republik-rakyat-tiongkok-rrt/diakses-pada-jam-10:25-tanggal-27/10/2017>

bunga yang terlalu tinggi, dan adanya maksud-maksud tertentu dari negara pendonor.⁷⁷

Untuk mengurangi ketergantungan pinjaman utang luar negeri maka diupayakan untuk meningkatkan kualitas pinjaman luar negeri tersebut dengan cara masa pinjaman yang lebih singkat. Dan juga pada proyek pembangunan Infrastruktur yang dananya berasal dari luar negeri akan dipercepat dalam pelaksanaannya. Sehingga semakin cepat pinjaman dan pembangunan yang dilakukan maka akan semakin cepat juga dana pinjaman tersebut akan terealisasi. Meskipun dengan utang yang banyak tersebut memerlukan jangka waktu yang panjang untuk pengembalian utangnya. Akan tetapi jika pembangunan Infrastruktur segera terealisasi maka manfaatnya akan di rasakan hingga masa mendatang.

Dengan diberikannya pinjaman secara berlebihan dari negara-negara maju termasuk dari negara Tiongkok, mau atau tidak mau pasti sumber daya yang ada di Indonesia akan dieksploitasi secara besar besaran. Negara negara penghutang terbesar ternyata juga menderita kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, seperti Brazil, Argentina, Meksiko, Venezuela, India, Indonesia dan juga Sri Lanka. Dikarenakan Sri Lankan tidak bisa mengembalikan utang kepada negara Tiongkok maka sebagai gantinya pelabuhan Sri Lanka diberikan kepada negara Tiongkok untuk menutup utang tersebut.⁷⁸

Islam merupakan agama sebagai pembawa rahmat, ketentuan-ketentuan hukumnya bersifat manusiawi, adil dan menuju kedamaian hubungan antar manusia, tidak memandang realita kehidupan manusia dengan sebelah mata dan juga menilainya dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem


⁷⁷ <https://zahidiahela.wordpress.com/2012/11/28/ketergantungan-indonesia-terhadap-hutang-luar-negeri/diakses-pada-jam-10:35> tanggal 25/10/2017

⁷⁸ Roem Topatimasang, "Hutang itu Hutang" (Yogyakarta,1999), Hal 81.

lainnya adalah bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali.⁷⁹

Islam mengajarkan bentuk-bentuk perekonomian baik berupa pesan moral dalam ajarannya maupun praktek yang dikembangkan umat generasi awal. Tujuan hukum Islam adalah kesejahteraan umat manusia bukan semata-mata ditentukan oleh pendekatan materi sebagai pendekatan satu-satunya, melainkan menempatkan ajaran-ajaran agama sebagai basis pertimbangan dalam segala kebijakan ekonominya.⁸⁰

Al-qur'an menawarkan beberapa solusi dalam hal penyelesaian utang, yaitu tercantum dalam Qs Al-baqarah ayat 280 :

81  وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qur'an terjemahan Muhammad Taufiq Qur'an Word Ver 1.3).

Ayat diatas menawarkan dua alternatif penyelesaian hutang, yaitu:

- 3) Memberikan waktu pembayaran sampai negara Indonesia punya kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Dalam masalah hutang luar negeri ini perlu diadakannya penjadwalan ulang (*Rescheduling*) terhadap pembayaran hutang bersama lembaga keuangan Internasional atau kepada negara Tiongkok. Penjadwalan ini bisa menjadikan Peringatan pembayaran hutang bagi negara Indonesia serta bisa juga disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 4) Pembebasan seluruh hutang dalam kondisi Indonesia benar-benar mengalami kesulitan atau benar-benar sudah tidak

⁷⁹ Yusuf Qardawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", terj. Didin Hafidhuddin, dkk., cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm 57.

⁸⁰ Abdul Mannan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", terj M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 230.

⁸¹ Al-Baqarah (2) : 280

sanggup lagi untuk membayar hutangnya. Maka yang demikian itu bisa dikatakan sangat manusiawi dan terpuji apabila negara Tiongkok mau membebaskan seluruh hutangnya tersebut.

Utang luar negeri memang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya, baik itu untuk meningkatkan dalam bidang perekonomiannya atautkah untuk memberdayakan di hal yang lainnya.

Dari sudut etika, keputusan pemerintah dalam mengambil utang luar negeri tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, yaitu apakah utang tersebut akan menyengsarakan masyarakat dalam jangka panjang atau justru mensejahterakan kehidupan rakyat yang sebenarnya. Apakah seluruh proses pembangunan yang menggunakan dana dari utang luar negeri tersebut mendatangkan manfaat atau justru menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat.

Dalam Islam ada konsep *maslahah*, kesejahteraan atau perbaikan hidup untuk menentukan ukuran-ukuran apakah suatu tindakan itu boleh dilakukan atautkah tidak boleh dilakukan. Karena utang luar negeri merupakan kebijakan dari pemerintah, maka hendaknya tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat dengan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan rakyat yang di pimpinnya.

Suatu negara pasti mempunyai kebijakan ekonominya sendiri untuk membiayai anggaran-anggaran belanjanya yang digunakan untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim maka persoalan utang luar negeri ini diserahkan kepada kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah Indonesia banyak menerima dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti *Consultative Group On Indonesia* (CGI), *International Monetary Fund* (IMF), *Asian Development Bank* (ADB), Bank Dunia, dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga tersebut berbasis kepada sistem perekonomian kapitalis, diaman masih adanya pemikiran untuk mendapatkan keuntungan dari negara Indonesia. Sehingga pengelolaanya masih pada sistem *interest* (bunga) sebagaimana pengelolaan yang ada pada perbankan konvensional. Dimana jika di Bank Konvensional masih menggunakan tingkat bunga yang sewaktu-waktu bisa mengalami kenaikan dan justru akan memberatkan pihak peminjam. Sudah jelas bahwa pengelolaan yang masih berdasarkan dengan riba itu sudah jelas haram dan tidak diperbolehkan oleh Islam.

Selain itu juga, Abdurrahman wahid juga berpendapat bahwa yang diharamkan dalam riba adalah yang bersifat eksploitasi. Memang menurutnya ada sebuah hadis dari Al-haris ibn Abu Usamah dari Ali ibn Abi Talib yang menyatakan : *Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*” (setiap transaksi yang memberikan kompensasi adalah transaksi riba).⁸²

Sehingga dikarenakan masih adanya eksploitasi dari negara Tiongkok kepada negara Indonesia itu berarti bahwa pemberian utang yang diberikan oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia masih belum sesuai dengan kaidah ekonomi Islam dimana ekonomi Islam itu mementingkan kesejahteraan bersama.

Dari sini dapat dilihat bahwa dalam transaksi utang piutang ini ada unsur *gharar* dari negara negara maju untuk mengambil kekayaan yang ada di negara berkembang termasuk Indonesia, baik itu melalui bunga pinjaman maupun persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam transaksi atau kontrak utang piutang. Dengan demikian kebijakan utang luar negeri seperti diuraikan diatas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah (ekonomi Islam), baik yang menyangkut sistem berdasarkan pada bunga yang memberatkan negara Indonesia

Diperoleh dua pandangan mengenai utang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. *Pandangan pertama* bahwa diperbolehkannya pembiayaan dari luar atau biasa disebut dengan *External Financing* yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya masih

⁸² Hadis Riwayat al-Haris ibn Abu Usamah dari Ali ibn Abi Talib.

diperlukan modifikasi. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam seperti: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan lainnya.

KESIMPULAN

Dari paparan penelitian yang saya tulis, Pemberian Utang Negara Tiongkok kepada negara Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam, yaitu antara teori, praktek dan implikasinya masih belum sesuai dengan ekonomi Islam. Dikarenakan masih adanya bunga dan juga sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Tiongkok masih menggunakan sistem ekonomi campuran yaitu antara sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Kapitalis, dimana masih memberatkan pihak yang berutang. Maka bisa dipastikan bahwa pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh negara Indonesia masih belum menggunakan sistem ekonomi Islam yang bermuara pada akidah Islam serta dapat menciptakan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, S. M. (2000). "Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional, Kebutuhan Etis", Dalam *As-Syir'ah. Jurnal Ilmu Syariah No 7 tahun 2000, Yogyakarta*, hlm 28.
- Hamid, E. S. (2004). *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu Isu Ekonomi Politik Indoneisa, cet 1 hlm 203-204*. Yogyakarta: UII Press.
- Harinowo, C. (2002). *Utang Pemerintah (Perkembangan, Prospek, dan Pengelolaannya)*, hlm 5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mannan, A. (1992). *Teori & Praktek Ekonomi Islam, hal 237-238*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm 6*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nasution, M. E. (2010). *pengenalan eksklusif ekonomi islam, hlm 11*. jakarta: Kencana Qutb, S. (n.d.). *Keadilan Sosial, hal 10*.
- Nazir, M. (1998). *Metodologi penelitian hlm 111*. Jakarta: Gramedia.
- Topatimangsang, R. (1999). *Hutang Itu Hutang*.hal 81. Yogyakarta: 1999.
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,cet 1 hlm 57*. Jakarta: Robbani Press.
- Gunawan, R. S. (2005). *Hubungan Simultan antara Utang Luar Negeri Pemerintah dan PDB di Indonesia, Tesis hlm 15*. Yogyakarta: Tesis UGM.
- Mas'ood, M. (1992). *dalam Skripsi Utang Luar Negeri dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Indonesia-Belanda oleh Ronggo Sudono, hlm 11*. Yogyakarta: Tesis UGM.
- Suratno. (2015). *Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah, Tabungan Domestik dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan di Indonesia, Tesis hlm 1*. Yogyakarta: Tesis UGM.